

RENJA  
2026

# RENCANA KERJA ( RENJA )

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun naskah Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun tiap tahun ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran untuk mendanai program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Selain itu untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program / kegiatan akan dilaporkan dalam LKjIP tahun 2026 nanti.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai penjabaran/pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga isi yang terkandung dalam Rencana Kerja (Renja) ini mengacu pada dokumen Renstra yang dimaksud.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun-tahun yang akan datang.

Magetan, 25 November 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAGETAN



**RUDY HARSONO, S. Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681201 198903 1 013

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>5</b>
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025. ....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	35
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>36</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
3.3 Program Dan Kegiatan.....	37
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
5.1 Catatan Penting .....	50
5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	50
5.3 Rencana Tindak Lanjut .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2026 mengacu pada RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2026 dan Renstra Satpol PP dan Damkar tahun 2024-2026. Di samping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar tahun 2018- 2023 sampai dengan tahun 2023. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerahs esuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- 1) persiapan penyusunan;
- 2) penyusunan rancangan awal;
- 3) penyusunan rancangan
- 4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 5) perumusan rancangan akhir; dan
- 6) penetapan.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Permendagri No 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
  15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan

- Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
  20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan
  21. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;
- b. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan;
- c. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja. Sedangkan tujuannya adalah :
  - a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ;
  - b. Memberikan pedoman bagi seluruh bidang dan seksi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran renstra;
  - c. Menyesuaikan rencana kegiatan dan pendanaan Satpol PP dan Damkar tahun 2026 sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan yang berlaku

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025.**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bahwa setiap dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja yang telah direncanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian Kinerja Tahun 2025 ini terfokus pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode Tahun 2025 - 2029 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan program dan kegiatannya dan capaian kerjanya.

Evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Adapun hasil rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun berjalan sebagaimana (lampiran dalam tabel) dibawah ini :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025  
Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah : **Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (Tahun 2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (Tahun 2024)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						volume	satuan	volume	satuan	volume			satuan	volume
2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>														

<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada</b>	<b>97</b>	<b>%</b>			<b>97</b>	<b>%</b>	<b>115</b>	<b>%</b>	<b>118.56</b>	<b>97</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>93%</b>
<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan masyarakat</b>	<b>2800</b>	<b>kasus</b>			<b>900</b>	<b>kasus</b>	<b>938</b>	<b>kasus</b>	<b>104.22</b>	<b>875</b>	<b>kasus</b>	<b>1629</b>	<b>58%</b>
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	1600	laporan			500	laporan	538	laporan	107.6	500	laporan	980	61%
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan"	1200	laporan			400	laporan	400	laporan	100	370	laporan	651	54%

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	dokume n			3	dokumen	4	dokume n	133.33	3	dokume n	7	28%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa HAM	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	orang			100	orang	100	orang	100	100	orang	166	55%
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah sosialisasi pengawasan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota</b>	336	laporan			88	laporan	84	laporan	95.45	71	laporan	123	37%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Ke lompok Masyarakat/Pelaku usaha	6	laporan			1	laporan	4	laporan	400	1	laporan	6	100%

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	180	laporan			50	laporan	60	laporan	120	20	laporan	96	53%
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	150	Laporan			50	laporan	19	laporan	38	50	laporan	25	17%
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran</b>	<b>80</b>	<b>%</b>			<b>80</b>	<b>%</b>	<b>81</b>	<b>%</b>	<b>101.25</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>149</b>	<b>186%</b>

<b>Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melaalui sosialisasi dan edukasi masyarakat</b>	<b>300</b>	<b>laporan</b>			<b>80</b>	<b>laporan</b>	<b>129</b>	<b>laporan</b>	<b>161.25</b>	<b>80</b>	<b>laporan</b>	<b>179</b>	<b>60%</b>
Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kab/kota	300	laporan			80	laporan	129	laporan	161.25	80	laporan	179	60%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	84	unit			43	unit	38	unit	88.37	10	unit	40	48%
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran</b>	<b>Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya</b>	<b>300</b>	<b>orang</b>			<b>30</b>	<b>orang</b>	<b>30</b>	<b>orang</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>orang</b>	<b>49</b>	<b>16%</b>

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	300	orang			30	orang	30	orang	100	30	orang	<b>49</b>	<b>16%</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat</b>	<b>240</b>	<b>angka</b>			<b>80</b>	<b>angka</b>	<b>80.62</b>	<b>angka</b>	<b>100.78</b>	<b>80</b>	<b>angka</b>	<b>160.62</b>	<b>67%</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	300	orang/bulan			1484	Orang/Bulan	1484	Orang/Bulan	100	100	Orang/Bulan	200	67%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	orang/bulan			1484	Orang/Bulan	1484	Orang/Bulan	100	100	Orang/Bulan	200	67%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	laporan			12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	20	56%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	Bulan			12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	21	58%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	21	58%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	21	58%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	21	58%

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>36</b>	<b>Bulan</b>			<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>21</b>	<b>58%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit			1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	2	67%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81	Unit			27	Unit	27	Unit	100	27	Unit	43	53%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	Unit			0	Unit	0	Unit	-	0	Unit	0	0%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>36</b>	<b>Bulan</b>			<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>21</b>	<b>58%</b>

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52	Paket			12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	21	40%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket			12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	21	58%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket			12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	21	58%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket			12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	21	58%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	72	Dokumen			24	Dokumen	24	Dokumen	100	24	Dokumen	42	58%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan			24	Laporan	24	Laporan	100	24	Laporan	42	58%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>630</b>	<b>Stel</b>			<b>106</b>	<b>Stel</b>	<b>106</b>	<b>Stel</b>	<b>100</b>	<b>116</b>	<b>Stel</b>	<b>222</b>	<b>35%</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	630	Stel			106	Stel	106	Stel	100	116	Stel	222	35%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4	Unit			0	Unit	0	Unit	-		Unit	0	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Unit			0	Unit	0	Unit	-		Unit	0	0%
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>54</b>	<b>Dokumen</b>			<b>18</b>	<b>Dokumen</b>	<b>18</b>	<b>Dokumen</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>Dokumen</b>	<b>40</b>	<b>74%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27	Dokumen			9	Dokumen	9	Dokumen	100	9	Dokumen	25	93%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27	Dokumen			9	Dokumen	9	Dokumen	100	9	Dokumen	15	56%

Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Faktor Pendukung tercapainya target :

- tersedianya media yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan gangguan Trantibum serta pelanggaran Perda
- adanya kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam membuat aduan dan mendapatkan layanan dari Satpol PP dan Damkar

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Faktor Pendukung tercapainya target:

- tersedianya media pelaporan yang memudahkan petugas maupun masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran dan mencari lokasi kejadiannya
- lokasi kejadian kebakaran rata2 dekat dengan petugas sehingga masih dapat dijangkau sesuai respon time
- kesiapsiagaan petugas damkar dalam menangani semua laporan yang masuk

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Faktor Pendukung tercapainya target:

- diadakannya banyak asistensi terkait SAKIP dari Pemerintah Daerah menyebabkan penyusun dokumen SAKIP menjadi lebih baik
- adanya kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam membuat aduan dan mendapatkan layanan dari Satpol PP dan Damkar

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap indikator kinerja kunci (IKK).

Adapun hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah sampai dengan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran**  
**Kabupaten Magetan**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Tindak Lanjut terhadap pengaduan pelanggaran Ketertiban Umum	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran			0	100	100	100	0	100	100	100	
	Persentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti	SPM		81	82	83	83,5	81	82	83	83,5	

dalam kurun waktu 15 menit												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis tentram dan tertib baik tertib sosial maupun tertib hukum adalah tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan secara nyata sesuai dengan harapan masyarakat. Isu-isu strategis mendasar yang harus segera tertangani adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya gangguan ODGJ, pengamen, pengemis, manusia silver dan badut serta pelanggaran pemasangan banner/reklame dan banner liar di Magetan dan wilayah perbatasan;
2. Banyaknya laporan pelajar bolos, pedagang PK5 yang melanggar serta pelanggaran Perda/perkada lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah
3. Kurangnya Pemberdayaan linmas sebagai sarana deteksi dini gangguan di wilayahnya masing-masing.
4. Adanya potensi gangguan keamanan yang terjadi pada event2 daerah ,kantor pemerintah, fasilitas umum dan tempat-tempat wisata
5. Banyaknya kejadian kebakaran diwilayah yang jauh dari jangkauan Mako Satpol PP dan Damkar
6. Kurangnya edukasi tentang kebakaran kepada masyarakat

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami fomulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Peningkatan intensitas patroli dan penertiban di pusat-pusat keramaian, tempat pariwisata dan fasilitas umum baik dalam kota magetan maupun di tingkat kecamatan
2. Peningkatan intensitas penertiban, pengawasan dan pembinaan serta sosialisasi tentang Perda/Perkada kepada masyarakat
3. Pemberdayaan linmas melalui pendataan, pelatihan dan sebagai tenaga bantuan pengamanan di tingkat kecamatan/kelurahan guna meningkatkan fungsi deteksi dini gangguan diwilayah masing-masing
4. Meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan anggota Satpol PP dan Damkar dalam mengamankan event-event daerah, kantor pemerintahan,
5. Meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan anggota damkar, serta pengadaan sarana prasarana pendukung guna mempercepat respontime kebakaran
6. Melaksanakan pelatihan kebakaran ringan kepada masyarakat

Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut maka akan mendukung tercapainya target SPM trantibumlinmas pada Kab. Magetan yakni terkait SPM Trantibum dan SPM Kebakaran.

Adapun Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan antara lain:
  1. Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibus tranmas) merupakan ancaman yang sangat rawan bagi Pemerintah Daerah dan msyarakat, kerana apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka iklim investasi akan sulit masuk dan berkembang, situasi dan kondisi perekonomian , sosial budaya dan politik, serta keamanan akan terancam dan dapat dikatakan tidak kondusif. Oleh karena itu gangguan tibus tranmas

harus diminimalisir bahkan dapat terjaga dan terkendali dengan baik

2. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah, karena apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak dipatuhi dan dilaksanakan, maka kewibawaan Pemerintah akan menurun dan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi rendah. Oleh karena itu Peraturan Daerah maupun
3. Peraturan Bupati harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, yang tidak sesuai dengan tuntutan keadaan segera dilakukan evaluasi dan disesuaikan
4. Kurangnya jumlah SDM Satpol PP dan Damkar karena banyak yang sudah pensiun
5. Kurangnya ketaatan dan kepedulian masyarakat terhadap peraturan daerah/peraturan kepala daerah
6. Bertambahnya jumlah penduduk bertambah pula tingkat kepadatan jumlah rumah satu dengan lainnya, potensi perluasan titik-titik kebakaran perlu ditingkatkan kewaspadaannya.
7. Kurangnya water supply/ tandon air bila terjadi kebakaran.

b. Peluang

1. Adanya dukungan dan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi, baik info positif maupun negatif yang bisa ditindaklanjuti
2. Keberadaan linmas desa yang dapat diberdayakan untuk deteksi dini masalah gangguan ketertiban umum dan kebakaran diwilayahnya masing-masing.

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan perangkat daerah terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil kinerja yang lebih optimal.

Reviu juga dilakukan terhadap program /kegiatan yang tidak terdapat Rancangan Awal RKPD/ ketidaksesuaian program / kegiatan maupun besaran anggaran.

Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 adalah sbb :

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap rancangan awal**  
**RKPD Tahun 2026 Kabupaten**  
**Magetan**

Nama OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. MAGETAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	-2	-3	-4	-5	(6)	-7	-8	-9	-10	(11)	-12
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KAB MAGETAN	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	97%	2,681,377,383	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KAB MAGETAN	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada	97%	2,681,377,383	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KAB MAGETAN	Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan	900 kasus	2.910.000.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KAB MAGETAN	Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan	900 kasus	2.910.000.000	

			N	masyarakat				masyarakat				
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	500 Laporan	971.270.380		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	500 Laporan	971.270.380
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	400 Laporan	119.075.687		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	400 Laporan	119.075.687

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	KA B MA GE TA N	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	134.559. 856		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	KAB MAGETAN	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokume n	134.559. 856	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	KA B MA GE TA N	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	260.757. 050		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	KAB MAGETAN	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	260.757. 050	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	KA B MA GE TA N	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen	2.659.35 0		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	KAB MAGETAN	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokume n	2.659.35 0	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	KA B MA GE TA N	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	48 Unit	2.850.00 0		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	KAB MAGETAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	48 unit	2.850.00 0	

	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>KAB B MA GE TAN</b>	<b>Jumlah laporan sosialisasi pengawasan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota</b>	<b>88 Laporan</b>	<b>2.020.000.000</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Jumlah laporan sosialisasi pengawasan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota</b>	<b>88 Laporan</b>	<b>2.020.000.000</b>	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	KA B MA GE TAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	441.150.760	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	441.150.760	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	KA B MA GE TAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50 Laporan	57.054.300	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50 Laporan	57.054.300	

	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	20 Laporan	692.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	20 Laporan	692.000.000
2	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran</b>	<b>80%</b>	<b>520.781.844</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran</b>	<b>80%</b>	<b>520.781.844</b>
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 laporan	513.580.294	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 laporan	513.580.294
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 laporan	338.177.500	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 laporan	338.177.500

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	KA B MA GE TA N	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	7 unit	175.402.794		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	KAB MAGETAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	7 unit	175.402.794	
--	--	--------------------------------	--	--------	-------------	--	--	----------------	--	--------	-------------	--

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	<b>KA B MA GE TA N</b>	<b>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</b>	<b>30 orang</b>	<b>7.201.550</b>		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</b>	<b>30 orang</b>	<b>7.201.550</b>	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	KA B MA GE TA N	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 orang	7.201.550		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	KAB MAGETAN	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 orang	7.201.550	
	3	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KA B MA GE TA N</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80 angka</b>	<b>10,796,139,339.80</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80 angka</b>	<b>10,796,139,339.80</b>	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>KA B MA GE TA N</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18 Dokumen</b>	<b>14.646.536</b>		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18 Dokumen</b>	<b>14.646.536</b>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KA B MA GE TA N	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.981.536		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB MAGETAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.981.536	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KA B MA GE TA N	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	6.665.00 0		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	6.665.00 0	
--	--	--------------------------------	---	-----------	---------------	--	--	----------------	---	--------------	---------------	--

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD</b>	<b>100 orang/bulan</b>	<b>9.755.677.659,80</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD</b>	<b>100 orang/bulan</b>	<b>9.755.677.659,80</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB MAGETAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	9.750.457.659,8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB MAGETAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	9.750.457.659,8	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.220.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.220.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>3 PAKET</b>	<b>58.287.402</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>3 PAKET</b>	<b>58.287.402</b>	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KAB MAGETAN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 PAKET	58.287.40 2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KAB MAGETAN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 PAKET	58.287.40 2	
--	--	----------------	---	---------	----------------	--	--	----------------	---	---------	----------------	--

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB MAGETAN	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	176.321.555	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB MAGETAN	Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	176.321.555	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB MAGETAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	38.078.150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB MAGETAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	38.078.150	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KAB MAGETAN	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	32.329.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KAB MAGETAN	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	32.329.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB MAGETAN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.214.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB MAGETAN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.214.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB MAGETAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.147.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB MAGETAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.147.500	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	KA B MA GE TA N	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	24 Dokumen	8.868.00 0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	KAB MAGETAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	24 Dokume n	8.868.00 0	
--	---	--------------------------------	--	---------------	---------------	--	---	----------------	--	-------------------	---------------	--

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	36.684.305	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	36.684.305	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>571.967.387</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>571.967.387</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56.010.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56.010.700	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	503.956.687	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB MAGETAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	503.956.687	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	KAB B M A G E T A N	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	219.238.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	KAB M A G E T A N	Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	219.238.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KA B M A G E T A N	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	39.738.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB M A G E T A N	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	39.738.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KA B M A G E T A N	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	179.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB M A G E T A N	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	179.500.000	

**Keterangan :** Pada table diatas terdapat perbedaan indikator dikarenakan RKPD 2026 ditetapkan lebih dahulu sebelum renstra tahun 2025-2029 ditetapkan

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak menerima usulan program maupun kegiatan dari pemangku kepentingan pada periode perencanaan ini. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya aspirasi, kebutuhan khusus, ataupun permintaan layanan tambahan yang disampaikan melalui mekanisme partisipatif seperti forum konsultasi publik, musrenbang, ataupun saluran komunikasi resmi lainnya. Dengan demikian, seluruh rencana program dan kegiatan yang tercantum saat ini sepenuhnya berasal dari analisis kebutuhan internal perangkat daerah, sesuai tugas, fungsi, serta prioritas pelayanan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penanggulangan kebakaran.

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Magetan**

Nama SKPD : **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I					
1		<b>NIHIL</b>			
2					
3					
4					

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Salah satu poin Prioritas Nasional adalah stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat kerja daerah yang dibentuk oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Disamping itu saat ini Pemadam Kebakaran ikut bergabung menjadi satu kesatuan menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Kebijakan provinsi Jawa timur adalah Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Melihat dari fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sejalan dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkup daerah yakni Kabupaten Magetan. Situasi daerah yang aman dan kondusif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, situasi aman tentram dari potensi pelanggaran Perda dan Kejadian Kebakaran akan bisa diwujudkan.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

1. Tujuan
  - a. Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban daerah
2. Sasaran
  - a. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - b. Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Menanggulangi Kebakaran
  - c. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar

**Tabel 3.1**  
**Target sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan**  
**Pemadam Kebakaran tahun 2026 :**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban daerah		Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas	<b>98 %</b>
		Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum (SPM)	<b>100 %</b>
		Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Presentase laporan Kejadian kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	<b>83 %</b>
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada Satpol pp dan Damkar	Nilai Sakip Satpol PP dan Damkar	<b>92,80</b>
			Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	<b>80,2</b>

### 3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 sejumlah 3 program, 10 Kegiatan, dan 26 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

#### A. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

##### 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan
- d. Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam

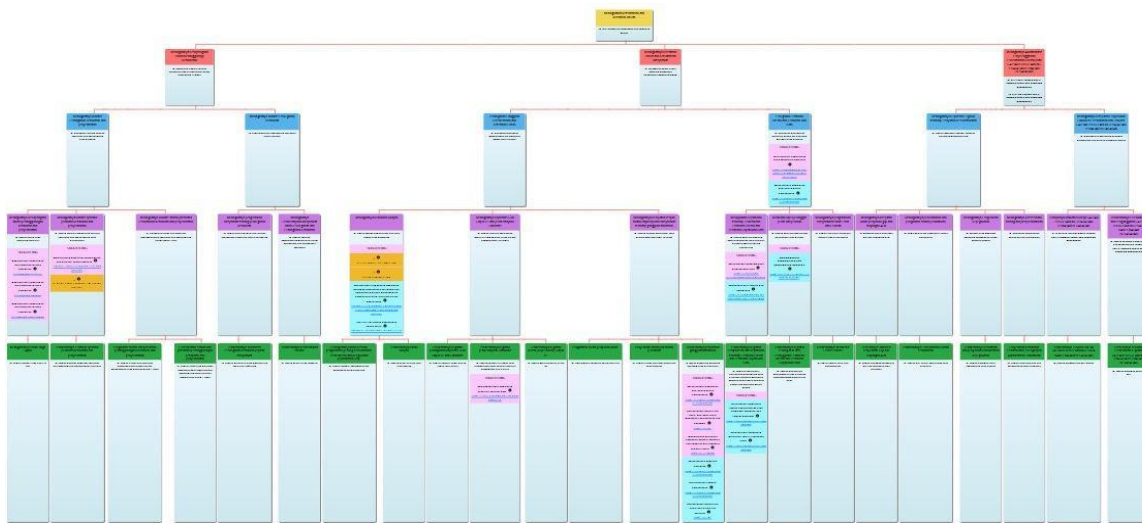
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

2. **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
    - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
    - b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
    - c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- B. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1. **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
    - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  2. **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**
    - a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

**Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## POHON KINERJA DAN CROSS CUTTING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN MAGETAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								

1.5.2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b> Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta kapasitas SDM Satpol PP, Damkar dan Satlinmas ]	<b>Persentase anggota Satpol PP Damkar &amp; Linmas yang meningkat kapasitasnya</b>  <b>Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas</b>  <b>Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/perkada</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>100%</b> <b>100%</b> <b>60%</b>	<b>2,681,377,383</b>	DBH		<b>97%</b>	<b>2,140,000,000</b>
1.5.2.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah pencegahan dan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan tenaga perlindungan masyarakat</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>860 laporan</b>	<b>1,491,172,323</b>	DBH		<b>900 laporan</b>	<b>1,890,000,000</b>
1.05.02.2.0 1.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KAB MAGETAN	3 Dokumen	134,559,856	DBH		4 dokumen	700.000.000,00
1.05.02.2.0 1.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	KAB MAGETAN	1 dokumen	2,659,350	DBH		3 dokumen	20.000.000

1.05.02.2.0 1.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	KAB MAGETAN	100 Orang	260,757,050	DBH		100 Orang	400.000.000,00
1.5.2.2.01. 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	KAB MAGETAN	500 Laporan	971,270,380	DBH		500 Laporan	1,600,000,000
1.5.2.2.01. 0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	KAB MAGETAN	360 Laporan	119,075,687	DBH		400 Laporan	240,000,000

1.05.02.2.0 1.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KAB MAGETAN	48 unit	2,850,000	DBH		100 unit	50,000,000
<b>1.5.2.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Jumlah laporan sosialisasi pengawasan dan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>88 Laporan</b>	<b>1,190,205,060</b>	DBH		<b>88 Laporan</b>	<b>250,000,000</b>
1.5.2.2.02. 0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KAB MAGETAN	1 Laporan	441,150,760	DBH, DBHCH T		1 Laporan	50,000,000
1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	KAB MAGETAN	25 Laporan	692,000,000	DBH		25 Laporan	200,000,000
1.05.02.2.0 2.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	KAB MAGETAN	50 Laporan	57,054,300	DBH, DBHCH T		20 Laporan	130.000.000,00

1.5.4	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Pemadam Kebakaran</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>100%</b>	<b>520,781,844</b>	DBH		<b>80%</b>	<b>940,000,000</b>
1.5.4.2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>80 laporan</b>	<b>513,580,294</b>	DBH		<b>80 laporan</b>	<b>920,000,000</b>
1.5.4.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	KAB MAGETAN	80 laporan	338,177,500	DBH		80 laporan	620,000,000
1.5.4.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	KAB MAGETAN	34 unit	175,402,794	DBH		34 unit	300,000,000

1.5.4.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	KAB MAGETAN	30 orang	7,201,550	DBH		30 orang	20,000,000
1.5.4.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	KAB MAGETAN	30 orang	7,201,550	DBH		30 orang	20,000,000
1.5.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> [ Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien)	<b>Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Satpol PP dan Damkar</b>  <b>Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Satpol PP dan Damkar</b>	KAB MAGETAN	<b>81 angka</b>  <b>94 persen</b>	<b>10,796,139,339</b>	DBH		<b>80 angka</b>	<b>9,768,757,185</b>
1.5.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB MAGETAN	18 Dokumen	14,646,536	DBH		18 Dokumen	24,000,000
1.5.1.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB MAGETAN	9 Dokumen	7,981,536	DBH		9 Dokumen	13,000,000

1.5.1.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KAB MAGETAN	9 Laporan	6,665,000	DBH		9 Laporan	11,000,000
<b>1.5.1.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	104 Orang/bulan	<b>9,755,677,659</b>	DBH		<b>100 orang/bulan</b>	<b>8,092,300,498</b>
1.5.1.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KAB MAGETAN	104 Orang/bulan	9,750,457,659	DAU		100 Orang/bulan	8,081,300,498
1.5.1.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KAB MAGETAN	12 Laporan	5,220,000	DBH		12 Laporan	11,000,000
<b>1.5.1.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	3 PAKET	<b>58,287,402</b>	DBH		3 PAKET	<b>320,000,000</b>
1.5.1.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KAB MAGETAN	3 PAKET	58,287,402	DBH		3 PAKET	320,000,000
<b>1.5.1.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>176,321,555</b>	DBH		<b>12 Bulan</b>	<b>428,500,000</b>

1.5.1.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB MAGETAN	12 Paket	38,078,150	DBH		12 Paket	200,000,000
1.5.1.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KAB MAGETAN	12 Paket	32,329,400	DBH		12 Paket	40,000,000
1.5.1.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KAB MAGETAN	12 Paket	50,214,200	DBH		12 Paket	70,000,000
1.5.1.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KAB MAGETAN	12 Paket	10,147,500	DBH		12 Paket	8,500,000
1.5.1.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KAB MAGETAN	24 Dokumen	8,868,000	DBH		24 Dokumen	10,000,000
1.5.1.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB MAGETAN	24 Laporan	36,684,305	DBH		24 Laporan	100,000,000
<b>1.5.1.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>571,967,387</b>	DBH		<b>12 Bulan</b>	<b>583,956,687</b>
1.5.1.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KAB MAGETAN	12 Laporan	56,010,700	DBH		12 Laporan	60,000,000

1.5.1.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KAB MAGETAN	12 Laporan	12,000,000	DBH		12 Laporan	20,000,000
1.5.1.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KAB MAGETAN	12 Laporan	503,956,687	DBH		12 Laporan	503,956,687
<b>1.5.1.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KAB MAGETAN</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>219,238,800</b>	DBH		<b>12 Bulan</b>	<b>320,000,000</b>
1.5.1.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KAB MAGETAN	1 Unit	39,738,800	DBH		1 Unit	80,000,000
1.5.1.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KAB MAGETAN	27 Unit	179,500,000	DBH		27 Unit	240,000,000
<b>TOTAL</b>					<b>13,998,298,566</b>				

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting**

- a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, semua pejabat pelaksana teknis kegiatan harus segera menindaklanjuti dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu
- b. Untuk menjamin sinergisitas dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan agar setiap pejabat pelaksana teknis kegiatan selalu melakukan koordinasi lintas bidang maupun instansi terkait agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

#### **5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.**

- c. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026 ini merupakan pedoman dalam menyusun rencana program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- d. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2026;
- e. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/kegiatan yang menemui kendala/masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi.

#### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana kerja digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing Bidang dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Magetan. Oleh karena itu setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi untuk mencapai target pada setiap kegiatan sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing, serta dilakukan evaluasi secara berkala setiap bulannya agar dapat diketahui progres pencapaian target beserta kendalanya.

Magetan, 25 November 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN MAGETAN

